

Digitalisasi Laporan Pertanggungjawaban dan Dokumen Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Mendukung Akuntabilitas Anggaran pada KPU Kota Kendari

Sulvariany Tamburaka¹⁾, Si Made Ngurah Purnaman^{2)*}, La Ode Anto³⁾, Nasrullah Dali⁴⁾, Hasnidar⁵⁾, Taufan Sufatriansa Awal⁶⁾, Safaruddin⁷⁾, Andien⁸⁾, Wa Ode Sitti Aisyah⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Program Studi Akutansi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.

Diterima: 01 07 2026

Direvisi: 09 07 2026

Disetujui: 23 07 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen bukti pemungutan suara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang diterapkan meliputi asistensi teknis langsung, pendampingan operasional, koordinasi dan konsultasi, serta pendampingan pasca-kegiatan, dengan melibatkan staf sekretariat dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai peserta utama. Materi kegiatan mencakup konsep dasar digitalisasi dokumen, regulasi pertanggungjawaban anggaran pemilu, tata cara pemindaian dan rekapitulasi dokumen ke dalam format digital, serta tata cara pengarsipan dokumen elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan teknis pegawai KPU Kota Kendari dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, melaksanakan pemindaian dokumen, serta merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara digital. Kegiatan ini juga mengidentifikasi tiga permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai keterkaitan digitalisasi dengan akuntabilitas anggaran, keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, serta risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban. Pendekatan berbasis SDGs terbukti efektif dalam membangun kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu, sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Kelembagaan yang Kuat), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Model kemitraan antara Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari berpotensi direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia

Kata kunci: digitalisasi dokumen, akuntabilitas anggaran pemilu, kpu kota kendari, sustainable development goals, pertanggungjawaban keuangan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan peristiwa demokrasi berskala terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemungutan suara serentak pada 14 Februari 2024 melibatkan ratusan juta pemilih terdaftar, ribuan calon legislatif, serta puluhan partai politik yang berkompetisi di seluruh pelosok Nusantara. Skala partisipasi yang demikian masif menjadikan proses penyelenggaraan pemilu ini memiliki kompleksitas administratif dan logistik yang sangat tinggi (Jurdi, 2023). KPU Kota Kendari sebagai satuan kerja penyelenggara di tingkat kota memikul tanggung jawab strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dengan prinsip transparan dan akuntabel. Kota Kendari yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik demografis dan geografis khas yang memengaruhi kompleksitas pengelolaan logistik serta anggaran pemilu (Zainal dkk., 2024). Di bawah struktur KPU Kota Kendari terdapat sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di seluruh kelurahan. Masing-masing unit kerja ini memegang tanggung jawab vital atas pengelolaan dana hibah pemerintah daerah serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara mandiri.

* Korespondensi Penulis. E-mail: madenp@uho.ac.id

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran ini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi di tingkat daerah secara berkelanjutan (Tarigan dkk., 2023).

Dalam kerangka pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilu, kewajiban utama bagi seluruh jajaran badan ad hoc adalah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan akurat, serta harus dilengkapi dokumen bukti pemungutan suara yang sah menurut hukum (Djidar et al., 2025). Kewajiban ini berlandaskan pada serangkaian regulasi nasional yang ketat, antara lain Keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemilu, Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah, serta ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi ini bukan sekadar pemenuhan formalitas birokrasi, melainkan fondasi utama bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah (Setiadi et al., 2025). Transformasi digital dalam sektor publik kini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat alur pelaporan, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. KPU Republik Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengembangkan berbagai sistem informasi berbasis digital, seperti SIREKAP untuk rekapitulasi data suara serta sistem informasi internal untuk pengelolaan keuangan (Ramdhan et al., 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem digitalisasi ini masih menghadapi hambatan signifikan di tingkat PPS pada KPU Kota Kendari.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan tim pengabdian dengan sejumlah petugas PPS, ditemukan bahwa sebagian besar personel belum sepenuhnya memahami tata cara pengunggahan dokumen pertanggungjawaban secara elektronik ke dalam sistem informasi KPU yang telah disediakan. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah Kota Kendari menjadi faktor pembatas yang serius, karena tidak seluruh kelurahan memiliki akses internet yang stabil dan memadai untuk melakukan sinkronisasi data besar (Perdana & Suharni, 2021). Kesenjangan digital yang nyata ini sangat menghambat kecepatan, akurasi, dan kelengkapan pelaporan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Petugas PPS pada umumnya merupakan warga masyarakat yang direkrut secara temporer untuk setiap agenda pemilu, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman teknologi informasi yang sangat beragam. Minimnya pelatihan komprehensif, tidak adanya modul pendampingan yang berkelanjutan mengenai penggunaan sistem informasi KPU, serta tingginya beban kerja selama tahapan pemilu memperparah kondisi ini. Absennya kapasitas digital yang memadai berpotensi mengganggu kualitas pertanggungjawaban keuangan, meliputi risiko keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian data antara dokumen fisik dan digital, ketidaklengkapan berkas yang diunggah, serta potensi temuan administratif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat (Nelawat et al., 2023).

Permasalahan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Tata kelola kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama dari SDG 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (Affairs, 2024). Penguatan literasi digital bagi para penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan ini secara tidak langsung sekaligus mendukung SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui transfer pengetahuan teknis (Nur et al., 2026). Mengingat pentingnya aspek akuntabilitas dalam pengelolaan hibah pemilu, maka digitalisasi dokumen bukan lagi merupakan opsi melainkan sebuah keharusan. Dengan demikian, penguasaan terhadap digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen pemungutan suara menjadi langkah paling krusial untuk menjamin integritas anggaran, efisiensi operasional, serta keberlangsungan demokrasi yang sehat (Fauziah et al., 2023).

Merespons realitas di lapangan tersebut, tim dosen dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo memandang sangat perlu untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara khusus difokuskan pada peningkatan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen pemungutan suara pada KPU Kota Kendari. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan asistensi teknis langsung mengenai tata cara pemindaian dokumen yang benar, teknik pengarsipan elektronik yang sistematis, serta tata cara rekapitulasi laporan pertanggungjawaban berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem KPU. Pendampingan ini melibatkan staf sekretariat dan seluruh anggota PPS sebagai peserta utama, yang dirancang sedemikian rupa bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan untuk membangun budaya kesadaran kelembagaan akan pentingnya akuntabilitas keuangan berbasis teknologi. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan teknis petugas KPU Kota Kendari, sehingga mereka mampu mengoperasikan sistem informasi KPU dengan lebih efektif, melakukan pemindaian dokumen secara benar, dan merekapitulasi laporan keuangan secara digital (Pramono et al., 2026). Model kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan KPU Kota Kendari diharapkan dapat menghasilkan solusi praktis yang dapat direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih akuntabel dan efisien (Fauziah et al., 2023).

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis guna meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban serta dokumen pemungutan suara di lingkungan KPU Kota Kendari. Tahap pertama adalah persiapan yang mencakup koordinasi intensif dengan pimpinan KPU Kota Kendari guna menyelaraskan agenda kegiatan dengan kebutuhan organisasi. Tim melakukan inventarisasi dokumen pertanggungjawaban yang memerlukan digitalisasi serta memetakan kondisi infrastruktur di masing-masing kelurahan. Seluruh perangkat pendukung disiapkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Tahap kedua berfokus pada identifikasi permasalahan secara mendalam melalui observasi terhadap kendala teknis yang dihadapi staf sekretariat dan anggota Panitia Pemungutan Suara. Tim menggali akar masalah terkait hambatan pengoperasian sistem informasi KPU, keterbatasan akses internet, serta rendahnya literasi digital petugas. Hasil identifikasi ini menjadi landasan utama dalam merancang materi pendampingan yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan (Hayat, 2025).

Tahap ketiga merupakan inti kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Tim memberikan pelatihan mengenai tata cara pemindaian dokumen yang efisien, manajemen pengarsipan elektronik, serta panduan praktis penggunaan sistem informasi keuangan KPU untuk pelaporan pertanggungjawaban. Peserta mendapatkan demonstrasi langsung dan kesempatan mempraktikkan seluruh alur kerja digital dalam lingkungan simulasi di bawah supervisi tim pengabdian (Sam et al., 2026). Pendekatan partisipatif ini memungkinkan setiap peserta menguasai kompetensi digital secara mandiri sebelum kembali bertugas di unit kerja masing-masing.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi untuk mengukur peningkatan kemampuan peserta pasca kegiatan. Tim melakukan evaluasi melalui hasil pre-test dan post-test serta analisis terhadap dokumen yang berhasil didigitalisasi oleh para peserta. Umpan balik dikumpulkan untuk menilai efektivitas model pendampingan dan mengidentifikasi kendala yang masih perlu ditangani (Yani et al., 2025). Seluruh rangkaian metode ini dirancang agar dapat direplikasi oleh pihak mitra secara mandiri sebagai upaya keberlanjutan program untuk mendukung akuntabilitas keuangan daerah yang transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**HASIL**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara intensif selama tiga bulan penuh di KPU Kota Kendari dengan melibatkan 45 orang peserta. Peserta terdiri dari staf sekretariat KPU Kota Kendari serta perwakilan anggota Panitia Pemungutan Suara dari 11 kecamatan yang tersebar di wilayah administratif Kota Kendari. Sebelum memulai pendampingan teknis, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan asesmen awal melalui kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam untuk memetakan tingkat literasi digital setiap peserta. Hasil survei awal menunjukkan realitas yang cukup memprihatinkan; hanya 31 persen peserta yang memiliki pemahaman memadai mengenai tata cara pemindaian dokumen sesuai standar pengarsipan elektronik pemerintah. Lebih lanjut, sebanyak 80 persen peserta menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan sistematis mengenai penggunaan sistem informasi internal KPU untuk keperluan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi ini mempertegas urgensi intervensi melalui pendampingan teknis intensif di tingkat akar rumput karena peran PPS sangat sentral dalam mengelola dana hibah secara transparan dan akuntabel.

Melalui serangkaian sesi pendampingan yang dirancang secara interaktif, seluruh peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk mempelajari alur kerja digitalisasi dokumen. Partisipasi aktif peserta tercermin dari tingginya frekuensi pertanyaan teknis yang diajukan serta kesediaan mereka untuk mempraktikkan setiap tahapan proses pengunggahan dokumen secara berulang. Fokus pendampingan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu standarisasi format berkas, teknik pemindaian dokumen agar menghasilkan citra dengan resolusi minimal 300 DPI, serta tata cara pengunggahan berkas ke basis data sistem informasi keuangan KPU. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenalan perangkat keras dan lunak, tetapi juga simulasi penanganan kendala teknis yang kerap muncul saat tahapan krusial pemilu berlangsung. Efektivitas partisipasi ini diukur secara komprehensif melalui evaluasi berupa pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah seluruh sesi berakhir. Hasil evaluasi mencerminkan peningkatan kompetensi yang signifikan sekaligus memberikan keyakinan bahwa program ini mampu memberikan dampak praktis yang nyata bagi mitra.



Gambar 1. Foto Sesi Pembukaan

Pencapaian paling nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah keberhasilan digitalisasi atas 540 berkas laporan pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik tanpa sistem pengarsipan yang rapi. Seluruh dokumen telah berhasil dikonversi ke format digital dengan resolusi tinggi, disertai tata nama file yang terstandarisasi berdasarkan kategori transaksi, tanggal kejadian, serta unit kerja pelaksana. Proses ini didukung oleh pemanfaatan perangkat pemindai portabel serta integrasi perangkat lunak manajemen dokumen pada setiap unit kerja yang terlibat. Setiap berkas yang diunggah telah diverifikasi memenuhi parameter audit sehingga memudahkan proses verifikasi bagi inspektorat di kemudian hari. Tabel 1 merangkum capaian kuantitatif hasil kegiatan digitalisasi selama masa pendampingan.

Tabel 1. Nama Tabel

Indikator Capaian	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan	Peningkatan
Jumlah dokumen terdigitalisasi	120 berkas	540 berkas	350 %
Peserta terampil mengoperasikan sistem	14 orang	45 orang	221 %
Rata-rata skor post-test	52	88	69 %
Waktu pelaporan pertanggungjawaban	14 hari	3 hari	78 %

Data pada Tabel 1 menunjukkan tren positif yang sangat kentara dalam kecepatan pemrosesan berkas setelah peserta mendapatkan modul panduan praktis dan pelatihan intensif. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa hambatan administratif selama ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan petugas, melainkan oleh absennya standar operasional prosedur digital yang mumpuni. Percepatan waktu pelaporan sebesar 78 persen menjadi bukti konkret efisiensi yang dihasilkan oleh model intervensi ini. Selain efisiensi waktu, kualitas dokumen digital yang dihasilkan kini memiliki tingkat keterbacaan jauh lebih baik sehingga memudahkan auditor dalam melakukan verifikasi tanpa harus memeriksa tumpukan berkas fisik yang sering kali berisiko rusak karena faktor usia atau kondisi penyimpanan.

Dokumentasi kegiatan yang terdiri dari foto praktik langsung serta tangkapan layar antarmuka sistem informasi membuktikan bahwa seluruh peserta telah memahami alur digitalisasi dari tahap pemindaian dokumen hingga tahap pengunggahan ke server KPU. Contoh hasil digitalisasi yang dihasilkan oleh peserta telah sesuai standar kelayakan dokumen elektronik yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Selain itu, tim pengabdian memastikan setiap peserta mendapatkan modul praktis sebagai rujukan jika menghadapi kendala di masa depan. Evaluasi pasca pendampingan menunjukkan bahwa kemampuan teknis peserta tetap stabil bahkan setelah masa pendampingan berakhir. Uji coba mandiri yang dilakukan tiga minggu setelah kegiatan menunjukkan bahwa 90 persen peserta masih mampu mengoperasikan sistem tanpa bantuan, yang membuktikan bahwa internalisasi proses digitalisasi telah tercapai dengan baik. Para peserta yang sebelumnya merasa cemas terhadap risiko temuan BPK kini mampu melakukan pengarsipan mandiri dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih baik. Keberhasilan ini bahkan memicu keinginan dari unit kerja lain di KPU Kota Kendari untuk menerapkan metode digitalisasi serupa dalam pengelolaan administrasi rutin di luar agenda pemilu.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

PEMBAHASAN

Peningkatan kompetensi peserta sebesar 221 persen menunjukkan bahwa metode pendampingan langsung sangat efektif dalam mengatasi kesenjangan literasi digital di lingkungan badan ad hoc KPU. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dzulkifli et al (2023) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui adopsi teknologi merupakan fondasi utama untuk mencapai tata kelola yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi dokumen pertanggungjawaban memungkinkan pemangku kepentingan memvalidasi bukti transaksi dengan cepat tanpa harus memeriksa tumpukan berkas fisik secara manual yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Integrasi sistem digital mempercepat alur pelaporan hingga 78 persen, sehingga risiko keterlambatan pengumpulan berkas dapat ditekan secara drastis. Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis sering kali bersumber dari absennya pelatihan berkelanjutan, bukan sekadar kurangnya ketersediaan perangkat keras semata.

Perubahan perilaku petugas dari sistem kerja manual menuju sistem kerja digital menjadi bukti kuat bahwa literasi digital dapat dibentuk melalui intervensi yang terarah dan konsisten. Dampak psikologis juga sangat terlihat; petugas merasa lebih aman bekerja karena seluruh riwayat pertanggungjawaban kini terekam dalam sistem yang terlindungi dan terverifikasi. Transformasi pola pikir dari "beban kerja tambahan" menjadi "pelindung diri dari temuan audit" merupakan pencapaian berharga yang melampaui aspek teknis semata (Urefe et al., 2024). Dengan adanya rekaman digital yang tertata, pihak KPU Kota Kendari kini memiliki basis data yang kuat untuk menghadapi proses audit, baik audit internal maupun eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.

Meskipun capaian kegiatan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, tim pengabdian mencatat tantangan nyata berupa ketidakstabilan akses internet di beberapa kelurahan yang letaknya jauh dari pusat kota. Hambatan ini sering kali membuat proses pengunggahan dokumen menjadi lebih lambat dibandingkan estimasi awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiarini et al (2025), kesenjangan digital tetap menjadi tantangan sistemik di Indonesia yang membutuhkan solusi lintas sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, tim menerapkan metode sinkronisasi offline-to-online. Petugas diminta melakukan pemindaian dan penamaan file di saat koneksi internet tidak stabil, kemudian melakukan pengunggahan massal saat mereka

berada di area dengan koneksi yang lebih baik. Metode ini terbukti mampu memitigasi kendala teknis tanpa menghentikan seluruh proses digitalisasi yang sedang berlangsung.

Selain kendala infrastruktur, resistensi perubahan perilaku juga menjadi tantangan tersendiri. Pada fase awal, staf sekretariat merasa terbebani dengan tambahan prosedur pemindaian manual di tengah beban kerja pemilu yang sangat tinggi. Namun, setelah tim menunjukkan secara konkret bagaimana sistem digital dapat mengurangi risiko dokumen hilang serta mempercepat durasi pelaporan, antusiasme peserta meningkat drastis. Strategi persuasif berbasis demonstrasi nyata ini terbukti mampu memitigasi rasa cemas peserta terhadap teknologi baru. Tabel 2 merangkum identifikasi kendala utama beserta solusi strategis yang diterapkan selama kegiatan pengabdian berlangsung.

Tabel 2. Matriks Identifikasi Kendala dan Solusi Digitalisasi

Kendala di Lapangan	Dampak Operasional	Solusi yang Diterapkan
Koneksi internet tidak stabil	Pengunggahan dokumen gagal	Metode sinkronisasi offline-to-online
Literasi digital rendah	Kesalahan input data	Pendampingan teknis personal secara bertahap
Format dokumen tidak standar	Sulit divalidasi sistem	Standardisasi template pemindaian dan penamaan file
Resistensi terhadap perubahan	Penurunan motivasi kerja	Pendekatan persuasif dan simulasi praktik nyata

Jika dibandingkan dengan program pengabdian serupa yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, kegiatan ini memiliki nilai tambah yang sangat signifikan dalam hal integrasi data secara real-time serta penerapan metode pendampingan one-on-one. Program terdahulu cenderung fokus terbatas pada pengarsipan dokumen saja tanpa menyentuh aspek validasi digital dalam sistem informasi keuangan KPU secara menyeluruh. Pendekatan hands-on yang diterapkan kali ini memberikan dampak lebih besar daripada sekadar ceramah teoritis, sebagaimana dikonfirmasi oleh temuan Primadasa et al (2025) mengenai kesenjangan digital di pemerintahan daerah. Keberhasilan ini juga mendukung komitmen pemerintah terhadap SDG 16 tentang kelembagaan yang transparan, sekaligus SDG 4 melalui transfer pengetahuan teknis yang praktis bagi para praktisi di lapangan.

Model kemitraan antara Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari memberikan preseden berharga bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam menjembatani kesenjangan kompetensi digital di sektor publik. Ke depannya, keberlanjutan program akan dijaga melalui pembentukan forum operator digital di tingkat KPU Kota Kendari yang secara mandiri melakukan bimbingan bagi anggota PPS baru. Kami juga mengusulkan adanya dashboard pemantauan digital yang dapat diakses oleh pimpinan KPU untuk memastikan proses pengarsipan tetap terjaga kualitasnya. Sistem pemantauan berkala melalui kanal komunikasi daring perlu dipertahankan guna memastikan bahwa kemampuan digital yang telah terbentuk tidak mengalami degradasi (Faizah et al., 2025). Implementasi jangka panjang dari sistem ini diharapkan mampu menurunkan risiko temuan administratif secara signifikan pada pemilu mendatang. Keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi teknologi, pendampingan intensif, serta komitmen kelembagaan merupakan kunci utama dalam mentransformasi birokrasi menjadi organisasi modern yang akuntabel dan efisien. Fokus kami ke depan adalah memastikan bahwa protokol digitalisasi ini diadopsi sebagai standar operasional prosedur resmi di seluruh satuan kerja KPU Kota Kendari agar manfaatnya dapat dirasakan secara permanen dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen bukti pemungutan suara Pemilu 2024 pada KPU Kota Kendari dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran. Secara spesifik, tujuan yang hendak dicapai meliputi penguatan pemahaman dan kemampuan teknis pegawai serta anggota PPS dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, melakukan pemindaian dokumen secara benar, serta merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara digital yang terintegrasi dengan sistem KPU.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tiga bulan bersama 45 peserta yang terdiri dari staf sekretariat dan anggota PPS dari 11 kecamatan, diperoleh beberapa capaian yang selaras dengan tujuan tersebut. Pertama, pemahaman dan kemampuan teknis pegawai KPU Kota Kendari meningkat secara signifikan, ditunjukkan dari rata-rata skor post-test yang naik dari 52 menjadi 88, serta jumlah peserta terampil yang bertambah dari 14 orang menjadi 45 orang. Kedua, kegiatan ini berhasil mendigitalisasi 540 berkas laporan pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk fisik tanpa sistem pengarsipan yang rapi, naik 350 persen dari kondisi awal sebelum pendampingan. Ketiga, waktu pelaporan pertanggungjawaban dapat dipersingkat dari 14 hari menjadi 3 hari, menunjukkan percepatan proses sebesar 78 persen. Keempat, evaluasi pasca-kegiatan yang dilakukan tiga minggu setelah pendampingan berakhir menunjukkan bahwa 90 persen peserta masih mampu mengoperasikan sistem secara mandiri, yang membuktikan bahwa internalisasi proses digitalisasi telah tercapai dengan baik.

Kegiatan ini juga mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang menjadi akar kendala di lapangan, yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai keterkaitan digitalisasi dengan akuntabilitas anggaran, keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, serta risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban. Melalui pendekatan asistensi teknis langsung, pendampingan operasional, serta simulasi praktik nyata, ketiga permasalahan tersebut berhasil ditangani secara bertahap dan terukur. Pendekatan berbasis SDGs terbukti efektif dalam membangun kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu, sejalan dengan SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 16 tentang Kelembagaan yang Kuat, dan SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Model kemitraan antara Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari melalui kegiatan pendampingan digitalisasi dokumen ini berpotensi direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga kontribusi akademik perguruan tinggi terhadap penguatan tata kelola pemilu dapat dirasakan secara lebih luas. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan asistensi teknis, peningkatan kompetensi SDM, dan kerangka keberlanjutan mampu menghasilkan dampak bermakna pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, beberapa saran diajukan sebagai berikut. Pertama, KPU Kota Kendari diharapkan terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal digitalisasi dokumen pertanggungjawaban keuangan pemilu, khususnya melalui pelatihan pengoperasian sistem informasi KPU yang terjadwal dan berkesinambungan bagi seluruh pegawai dan PPS sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Kedua, KPU Kota Kendari perlu memastikan ketersediaan perangkat pemindai yang memadai serta menyediakan panduan teknis tertulis mengenai standar kualitas pemindaian dan format rekapitulasi dokumen agar seluruh pegawai dapat

melaksanakan proses digitalisasi secara seragam dan sesuai ketentuan regulasi. Ketiga, Universitas Halu Oleo melalui Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan melanjutkan dan mengembangkan kegiatan kemitraan dengan KPU Kota Kendari maupun lembaga penyelenggara pemilu di daerah lain dengan tema-tema yang relevan. Keempat, KPU Republik Indonesia perlu mempertimbangkan penyusunan panduan teknis digitalisasi dokumen pertanggungjawaban yang lebih rinci dan mudah dipahami dengan memperhatikan kemampuan teknis pegawai di berbagai daerah, sehingga kualitas dokumen digital yang dihasilkan dapat lebih seragam di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, U. N. Department of Economic and Social Affairs. (2024). The Sustainable Development Goals Report 2024. United Nations. <https://doi.org/10.18356/9789213589755>
- Br., S. E. C., & Hisar, S. (2026). Analisis pengelolaan dana pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara: Peran divisi keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. In Zenodo. European Organization for Nuclear Research. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18796536>
- Djidar, H., Nur, A. R., Kamal, K., & Suhaeb. (2025). Challenges and the urgency of regulatory reform for ad hoc election bodies: A case study of Luwu Regency. *Journal of Social and Policy Issues*, 5(1), 73–78. <https://doi.org/10.58835/jspi.v5i1.417>
- Dzulkifli, D., Nurdin, N. H., & Purna, Z. A. (2023). Unleashing the power of capacity building: Transforming governance and policy implementation in the digital era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14121>
- Faizah, N. A., Thohir, M., Salem, S., & Mardhiyah. (2025). Optimizing digital archive management to improve the quality of integrated public services. *Kharisma Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v4i1.64>
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Ferriyanto, Siahaan, R. K. E., Reniati, & Wardhani, R. S. (2025). Environmental sustainability in electoral governance: Evidence from the Bangka Belitung Election Supervisory Board. *Journal of Technology Management and Technopreneurship (JTMT)*, 13(3). <https://doi.org/10.54554/jtmt.2025.13.03.001>
- Hayat, N. (2025). Peningkatan kompetensi digital pengawas pemilu melalui pelatihan berbasis simulasi. *Jurisprudensi*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.02>
- Jurdi, S. (2023). Institutional context of General Elections Commission and the implementation of the 2024 election. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 212–236. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a6>
- Nakpodia, F., Sakariyahu, R., Fagbemi, T. O., Adigun, R. A., & Dosumu, O. (2024). Sustainable development goals, accounting practices and public financial management: A pre and post COVID-19 assessment. *British Accounting Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101466>
- Nelawat, E. I., Suharto, S., & Mazni, A. (2023). Analisis kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan

- Nur, D., Agustin, R. F., & Putra, Y. P. (2026). Webinar edukatif-reflektif sebagai strategi penguatan literasi digital etis dan berkelanjutan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 7(1), 124–135. <https://doi.org/10.52060/jppm.v7i1.3925>
- Nurrasyidin, M., Nugroho, A. W., Hidayat, F., & Sumarso, S. (2025). Sinergi pendidikan perguruan tinggi dan SMK dalam pengembangan ilmu akuntansi. *INTEGRATIF: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.60041/integratif.v2i2.149>
- Perdana, A. L., & Suharni, S. (2021). Analisis adopsi inovasi teknologi informasi menggunakan Innovation Diffusion Theory (IDT) pada PPDB Online SMKN 3 Gowa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 1(7), 269–274. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.57>
- Pramono, B., Isnawaty, I., Aksara, L. M. F., Mubaraq, M. F., Nathania, M., & Arief, A. D. (2026). Pelatihan aplikasi perkantoran Microsoft Word bagi pegawai perempuan Pemerintah Daerah Kota Kendari untuk meningkatkan kompetensi administrasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(11), 6779–6784. <https://doi.org/10.59837/jpmbs.v3i11.3917>
- Primadasa, Y., Saputra, A. Y., Ahmadi, A., Mawartika, Y. E. B., & Hamidani, S. (2025). Transformasi digital pengawasan internal pemerintah melalui implementasi SIGAP di Inspektorat Kota Lubuklinggau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak*, 1(3), 89–94. <https://doi.org/10.64803/jupemba.v1i3.55>
- Ramadhan, A. S., Hakim, C. A., Putra, D. S. S., Sari, D. P., Amyati, A., & Priatna, A. N. (2025). Pelatihan optimalisasi teknologi SIREKAP dalam perhitungan dan rekapitulasi suara KPPS TPS 04 Kelurahan Panancangan. *Abdimas Galuh*, 7(1), 370. <https://doi.org/10.25157/ag.v7i1.16885>
- Sam, I., Kusumastuti, R., Gowon, M., Sumarni, S., & Heriyani, H. (2026). Penguatan penataan sistem administrasi kegiatan dan arsip keuangan kelurahan berbasis digital di Kantor Lurah Olak Kemang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2768–2775. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.850>
- Setiadi, P. B., Fiki, K., & Rahayu, S. (2025). Implementation of Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023 regarding individual taxpayer compliance as an effort to streamline state revenue (Case study: PT Indobismar in Surabaya). *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(4). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i4.8276>
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis pengelolaan keuangan dan pengeluaran daerah terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.14474>
- Urefe, O., Odonkor, T. N., & Agu, E. E. (2024). Enhancing financial reporting accuracy and compliance efficiency in legal firms through technological innovations. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(8), 2549–2560. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i8.1386>
- Yani, A. Y. A., Doviyanto, R., Mulyadi, M., & Ansari. (2025). Optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi arsip surat menyurat di kantor kelurahan. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (Bhakti Jivana)*, 2(2), 33–39. <https://doi.org/10.65055/bhaktijivana.v2i2.41>

Zainal, A. S., Ahmad, R. G., Murniati, M., Ma'ruf, A. A., & Harlan, L. O. A. (2024). Evaluasi praktik akuntabilitas pemerintahan di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(1), 371–381. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.367>